

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pemerintah Kota Dumai**

TAHUN ANGGARAN 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Jl. Putri Tujuh Komplek Perumahan Pemerintah Kota Dumai



www.dpppa.dumaikota.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Isu-isu Strategis	5
1.5 Cascading Kinerja	5
1.6 Peta Proses Bisnis	7
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Tujuan dan sasaran	12
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3.1 Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023... ..	22
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023.....	31
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra....	34
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM)..	36
3.5 Akuntabilitas keuangan	37
3.6 Pencapaian kinerja dan anggaran.....	38
3.7 Efisiensi penggunaan sumber daya	40
3.8 Prestasi dan Penghargaan	41
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan (jika ada)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut.....	8
Tabel 1.2	Tindak Lanjut Terhadap Laporan Hasil Evaluasi	9
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	14
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	15
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai....	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023.....	17
Tabel 2.5	Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	18
Tabel 2.6	Program kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	22
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023.....	23
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	32
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra.....	35
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.	36
Tabel 3.7	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas).....	38
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	39
Tabel 3.9	Prestasi dan Penghargaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	4
Gambar 1.2 Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	6
Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	7
Gambar 2.1 Misi Kota Dumai.....	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai 29 Januari 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

MAINI ASNA, SKM, M. Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19680529 198903 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka sebagai unsur teknis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

- 1 Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- 2 Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya;
- 3 Pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- 4 Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 5 Perekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- 6 Pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
- 7 Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- 8 Pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka

pelaksanaan tugas;

- 9 Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Wali kota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- 10 Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- 11 Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. melaksanakan MISI yang ke 2 (Dua) RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “ **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati diri Melayu** “ dan SASARAN yang ke 2 (Dua) yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “ **Mewujudkan masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera** “

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2021 – 2026 .telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 7 (Tujuh) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

- I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 1. Kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten / kota

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

Sub kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

II. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota

IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VII. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023 mengalami 2 (dua) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	750
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	810

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar 5.845.083.194 (*Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) untuk melaksanakan 7(Tujuh) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.4.2.
Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 210.263.700	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 25.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 5.999.300	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 24.999.980	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 68.990.200	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 29.999.580	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.479.830.434	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 5.845.083.194	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.3
Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 263.253.700	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 185.546.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 5.999.300	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 40.524.980	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 188.990.200	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 467.453.580	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.515.124.778	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
J U M L A H		Rp. 7.666.892.538	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%.	105.3%	100%	√			
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	750	100.6%	754.13	√			
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	810	75,93%	615		√		

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori Sangat Tinggi (93,92%) yaitu Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 7.666.892.538 (*Tujuh Milyar Eam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) bersumber dari dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan dana alokasi Anggaran tersebut terdiri dari **BELANJA OPERASI** sebesar Rp. 7.525.246.046 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Empat Puluh Enam Rupiah*) dan **BELANJA MODAL** sebesar Rp. 141.646.492 (*Seratus Empat Pulih Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*)

1. Belanja Operasi	:	Rp.	7.525.246.046
2. Belanja Modal	:	Rp.	141.646.492
Jumlah	:	Rp.	7.666.892.538

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2023

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%	100%	105.3%			
Program : Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30%			185.546.000	166.145.600	89.54
Program : Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	50%			467.453.580	405.093.983	86.65
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	Skor pencapaian kota layak anak	750	754.13	100.6%			

Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan							
Program : Program Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya capaian skor kota layak anak	75%			188.990.200	185.087.161	97.93
Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	80%			5.999.300	5.997.500	99.97
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	810	615	75.93%			
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan							
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di Kota Dumai	15%			263.253.700	262.758.000	99.81
Program : Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	35%			40.524.980	39.088.900	96.45

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	105,27%	88,10%	1,20	%	Efisien
2.		Skor pencapaian kota layak anak	100,55%	98,95%	1,02	%	Efisien
3.		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	75,93%	98,13%	0,78	%	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama* yaitu cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar tingkat efisiensinya adalah 1.20 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (105.27%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88.10%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama* yaitu skor pencapaian kota layak anak tingkat efisiensinya adalah 1.02 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100.55%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.95%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama* yaitu skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) tingkat efisiensinya adalah 0.78 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023

(75.93%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.13%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG;**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 55 Tahun 16 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya;
3. Pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
4. Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
5. Perekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
6. Pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
7. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
8. Pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
9. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Wali kota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
10. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah; dan
11. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

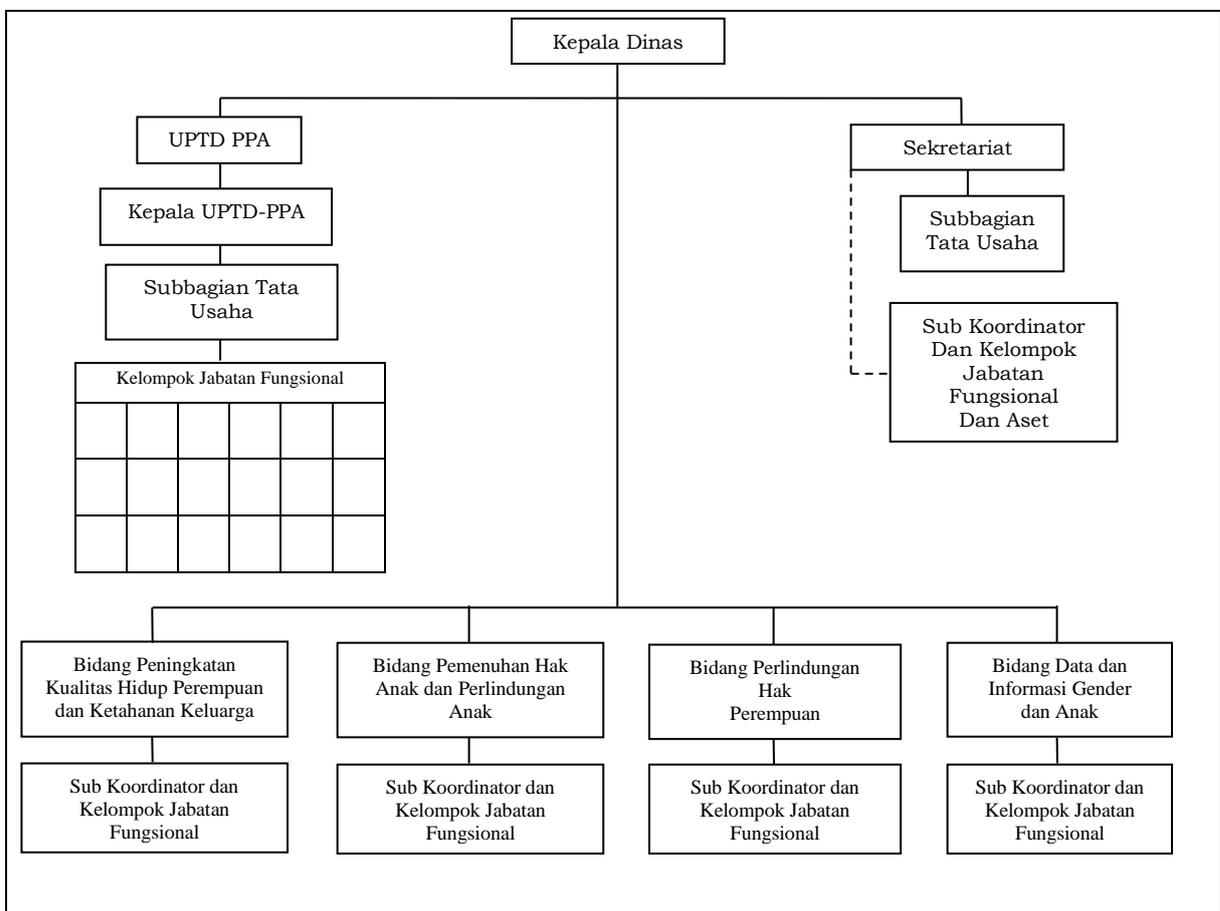
Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga, terdiri dari :

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Data Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKJIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindak lanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang perlu ditangani sbb:

1. Masih adanya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Dumai
2. Belum maksimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG) di Kota Dumai
3. Belum maksimalnya pelaksanaan data gender dan anak di Kota Dumai
4. Belum optimalnya pelayanan publik karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah
5. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dalam menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan
6. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (Electronic Government) belum optimal.

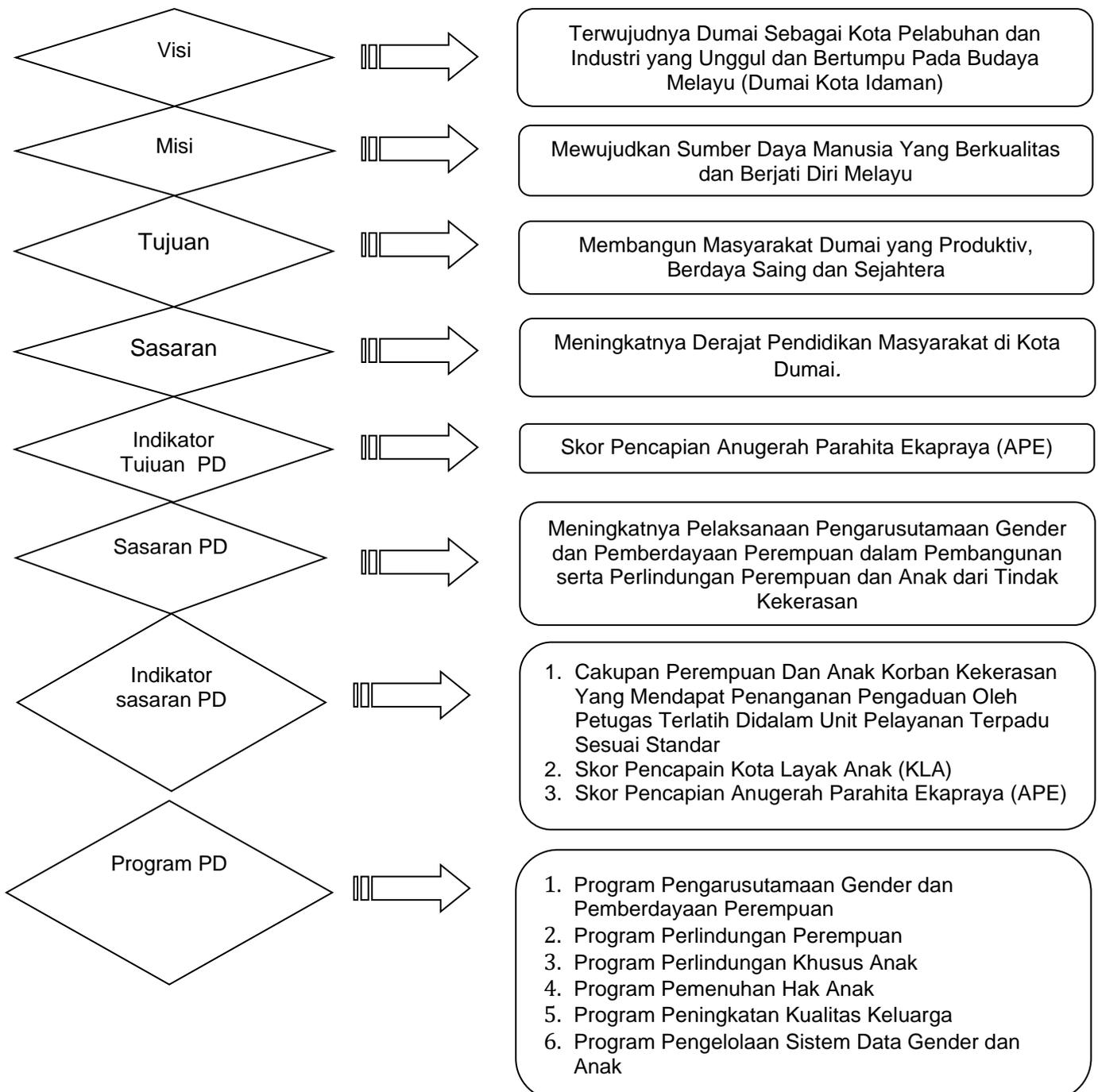
1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. (Setiap Perangkat Daerah)

dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2

Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

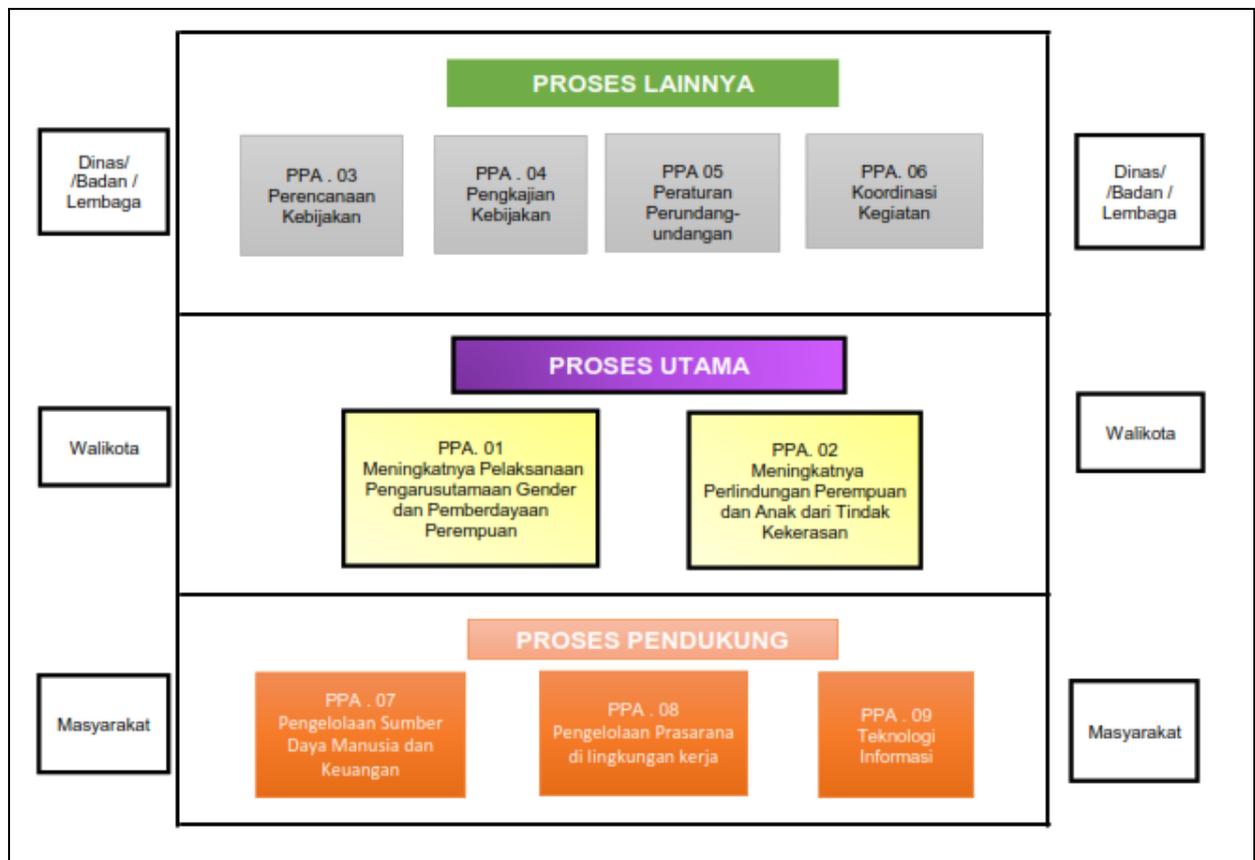


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.3

Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai

Nomor 700/1315.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.1 Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Rumusan perencanaan kinerja belum memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui Crosscutting	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam merumuskan perencanaan kinerja agar dapat memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui Crosscutting
2.	Pelaksanaan monitoring Evaluasi (Monev) dalam pengukuran capaian kinerja tidak dilampirkan dengan nota dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Agar membuat Nota Dinas dan Notulen terkait monitoring Evaluasi (Monev) dalam mengukur capaian kinerja dalam mengambil keputusan pimpinan
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah membuat laporan monev namun dirasa belum mewakili pengukuran capaian kinerja yang diharapkan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai agar membuat laporan monev untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai belum membuat nota dinas dalam pelaksanaan evaluasi kinerja	Informasi dalam laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai kedepannya dapat menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian keberhasilan kerja dengan membuat Nota Dinas Evaluasi Kinerja

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tindak Lanjut Terhadap Laporan Hasil Evaluasi

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Rumusan perencanaan kinerja sudah digambarkan melalui Crosscutting	1 Hari
2.	Telah membuat nota dinas dan notulen terkait monitoring evaluasi (Monev) dalam pengukuran capaian kinerja	1 Hari
3.	Pengukuran capaian kinerja sudah dibuat dalam bentuk laporan capaian kinerja	1 Hari
4.	Telah membuat nota dinas terkait evaluasi pencapaian keberhasilan kerja	1 Hari

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai dst	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	810	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%
				Skor Pencapaian Kota Layak Anak	750
				Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	810

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai dst	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
		Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
		Terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak	Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar 2. Skor Pencapaian Kota Layak Anak 3. Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Dumai Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	750
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	810

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

didukung dengan anggaran sebesar *Rp. 5.845.083.194 (Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)* untuk melaksanakan 7 (Tujuh) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 210.263.700	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 25.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 5.999.300	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 24.999.980	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 68.990.200	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 29.999.580	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.479.830.434	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 5.845.083.194	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 263.253.700	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 185.546.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 5.999.300	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 40.524.980	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 188.990.200	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 467.453.580	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.515.124.778	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
J U M L A H		Rp. 7.666.892.538	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam table 3.3 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	100%	105.3%	95%	100%	105.27%	Sangat berhasil
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	703.5	100.5%	750	754.13	100.55%	Sangat berhasil
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	3862.5	121.2%	810	615	75.93%	Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar.
 - a. **Capaian kinerja untuk indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar** menunjukkan capaian yang tetap.

Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 95% realisasi sebesar 100% tercapai 105.27% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 105.27%, maka capaian tahun 2023 tetap sebesar 100%.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Program Perlindungan Perempuan

a) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan rapat koordinasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak , kegiatan sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme, kegiatan pengembangan desa atau kelurahan ramah perempuan dan anak dan kegiatan penyusunan nota kesepahaman pada 7 Kecamatan.

b) Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota. dengan target 25 layanan dengan sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan

koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 25 layanan dan terealisasi 100 %.

c) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain:

- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan berupa sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak di sekolah.

- Program Perlindungan Khusus Anak

a) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 %. Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak di kecamatan, kegiatan kampanye perlindungan perempuan dan anak.

b) Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan

pengaduan kewenangan kabupaten/kota dengan target 50 orang dan terealisasi 100 %.

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota dengan target 7 layanan dan terealisasi 100%.
- c) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan :
- Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota dengan target 2 dokumen dan terealisasi 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain berupa pelatihan pencatatan pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak melalui simphony, pelatihan pendampingan korban TPPO dan pelatihan Psychological First Aid.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kualitas SDM UPT PPA dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman satgas peduli perempuan dan anak dalam hal penjangkaran kasus kekerasan perempuan dan anak.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas sdm UPT PPA ;
- Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal penjangkauan, pemantauan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada satuan tugas – satuan tugas Peduli Perempuan dan Anak (DULREMPAK) yang ada di kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan Dinas PPPA Kota Dumai.

2. Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak

a. Capaian kinerja untuk indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 750 realisasi sebesar 754.13 tercapai 100.55% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 705.3 atau tercapai sebesar 100.5%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 100.55%.

b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator skor pencapaian kota layak anak melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Program Pemenuhan Hak Anak
 - a) Kegiatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari sub kegiatan :
 - Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan

dunia usaha yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dengan target 4 organisasi dan tercapai 100%, dengan pelaksanaan kegiatan Informasi Layak Anak (ILA) dan Replikasi PATBM.

b) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan target 50 orang dan terealisasi 100%.
- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan indikator keluaran jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100% dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan konveksi hak anak, kegiatan seminar psikologis, dan kegiatan koordinasi dengan APSAI.
- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan indikator keluaran jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan target 2 dokumen dan terealisasi 100% dengan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi GT-KLA, kegiatan rapat pokja GT-KLA, kegiatan pembentukan forum anak,

kegiatan pembinaan forum anak, kegiatan pemilihan duta anak dan kegiatan peringatan hari anak nasional.

c. Faktor penghambat skor pencapaian kota layak anak adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pencapaian Dumai sebagai kota layak anak.
- Belum terbentuknya peraturan daerah tentang kota layak anak.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator skor pencapaian kota layak anak adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pencapaian Dumai sebagai kota layak anak;
- Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak anak;
- Meningkatkan advokasi kepada perangkat daerah dalam memberikan inovasi pengembangan kegiatan;
- Melakukan advokasi kepada kepala daerah kota Dumai dan DPRD untuk terwujudnya perda kota layak anak.

3. Indikator skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE)

a. Capaian kinerja untuk indikator skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 810 realisasi sebesar 615 tercapai 75.93% atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3862.5 atau tercapai sebesar 121.2%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 75.93%.

b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) kurang target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terdiri dari:

a) Kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%.
- Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indicator keluaran yaitu jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsive gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota dengan target 10 perangkat daerah, dan terealisasi 100%.
- Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indikator keluaran jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsive gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota dengan target 20 perangkat daerah dan terealisasi 100%.

b) Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dengan indicator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%.

c) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang tersedia dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%.
- Program pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari:
 - a) Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%.
 - Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100%.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) adalah sebagai berikut:

- Perubahan indikator evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dari dua indikator yaitu dimensi prasyarat dan dimensi pelaksanaan menjadi tiga indikator yaitu dimensi pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan, serta inovasi.
- Perubahan cara perhitungan evaluasi sehingga terjadi perubahan target skor pada tahun 2023 yang semula 3862 menjadi 810 yang berdampak pada penurunan nominal skor.
- Perubahan kategori skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) yang semula terdiri dari 4 predikat yaitu PRATAMA dengan range skor (2512.5-3187) , MADYA dengan range skor (3187.5-

3862), UTAMA dengan range skor (3862.5-4537) dan MENTOR dengan range skor (>4537.5) menjadi 5 predikat yaitu predikat PRATAMA dengan range skor (501-600), MADYA dengan range skor (601-700), NINDYA dengan range skor (701-800), UTAMA dengan range skor (801-900) dan MENTOR dengan range skor (>900).

d. Tindak lanjut Capaian Indikator skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) ;
- Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG);
- Memperkuat kerjasama tim dalam hal penyebarluasan informasi tentang perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG);

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%	95%	100%	100%	105.3%	105.27%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	700	750	703.5	754.13	105.3%	100.55%
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	3187	810	3862.5	615	121.2%	75.93%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat tiga Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar dengan target pada tahun 2022 adalah 95% berasal dari perhitungan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar dibagi dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang berkunjung di Upt PPA dikali 100%.
- b. Pada tahun 2022 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar dengan rincian jumlah korban kekerasan perempuan di Kota Dumai pada tahun 2022 tercatat sebanyak 21 orang dan korban kekerasan pada anak sebanyak 114 orang. Dengan demikian total korban kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 135

orang dan jumlah korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar sebanyak 135 orang. Realisasi pada tahun 2022 adalah 105.3% dengan capaian 100%.

c. Pada tahun 2023 tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 105.27% dengan rincian jumlah korban kekerasan perempuan di Kota Dumai pada tahun 2022 tercatat sebanyak 20 orang dan korban kekerasan pada anak sebanyak 154 orang. Dengan demikian total korban kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2023 sebanyak 174 orang dan jumlah korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar sebanyak 174 orang dengan capaian kinerja 100%.

2a. Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah Skor pencapaian kota layak anak dengan target pada tahun 2022 adalah 700 berasal dari perhitungan Skor verifikasi administrasi dibagi dengan skor evaluasi mandiri dikali 1000.

b. Pada tahun 2022 Skor pencapaian kota layak anak untuk Kota Dumai sebesar 703.5 dari target 700 yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Realisasi pada tahun 2022 adalah 100.5%.

c. Pada tahun 2023 naik menjadi 754.13 dan realisasinya adalah 100.55% pada target skor sebesar 750.

3a. Indikator Kinerja yang ketiga adalah Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) dengan target skor pada tahun 2022 adalah 3187 berasal dari perhitungan Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) ditambah dengan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan ditambah dengan Inovasi.

b. Pada tahun 2022 Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) untuk Kota Dumai sebesar 3862.5 dari target 3187 yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Realisasi pada tahun 2022 adalah 121.2% dengan predikat Utama.

c. Pada tahun 2023 turun menjadi 615 dan realisasinya adalah 75.93% dengan penurunan predikat dari Utama menjadi Madya pada target skor sebesar 810. Pada realisasi tahun 2023 skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) tidak tercapai 100% hal ini disebabkan oleh :

- perubahan indikator evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dari dua indikator yaitu dimensi prasyarat dan dimensi

pelaksanaan menjadi tiga indikator yaitu dimensi pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan, serta inovasi.

- perubahan cara perhitungan evaluasi sehingga terjadi perubahan target skor pada tahun 2023 yang semula 3862 menjadi 810 yang berdampak pada penurunan nominal skor.
- perubahan kategori skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) yang semula terdiri dari 4 predikat yaitu PRATAMA dengan range skor (2512.5-3187) , MADYA dengan range skor (3187.5-3862), UTAMA dengan range skor (3862.5-4537) dan MENTOR dengan range skor (>4537.5) menjadi 5 predikat yaitu predikat PRATAMA dengan range skor (501-600), MADYA dengan range skor (601-700), NINDYA dengan range skor (701-800), UTAMA dengan range skor (801-900) dan MENTOR dengan range skor (>900).

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan SANGAT BERHASIL.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%	100%	105.3%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	900	754.13	83.8%
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	840	615	73.3%

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

3. Capaian Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas sdm UPT PPA ;
 - Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal penjangkaran, pemantauan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada satuan tugas – satuan tugas Peduli Perempuan dan Anak (DULREMPAK) yang ada di kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan Dinas PPPA Kota Dumai;
4. Capaian Indikator skor pencapaian kota layak anak sebagai berikut:
 - Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pencapaian Dumai sebagai kota layak anak;
 - Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian

kota layak anak;

5. Capaian Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai berikut :

- Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) ;
- Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG);
- Memperkuat kerjasama tim dalam hal penyebarluasan informasi tentang perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG);

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana table 3.5 berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	100%	-	Tidak ada
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	705.3	-	Tidak ada
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	3862.5	-	Tidak ada

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 7.666.892.538 (Tujuh Milyar Eam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)* bersumber dari dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus Anggaran tersebut terdiri dari **BELANJA OPERASI** sebesar *Rp. 7.525.246.046 (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Empat Puluh Enam Rupiah)* dan **BELANJA MODAL** sebesar *Rp. 141.646.492 (Seratus Empat Pulih Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)*.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar *Rp. 7.338.057.658 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)*, terdiri dari Belanja Operasi *Rp. 7.198.027.658 (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)* dan Belanja

Modal terealisasi Rp. 140.030.000 (Seratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rata Rata
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 263.253.700	Rp. 262.758.000	99.81	
		Program Perlindungan Perempuan	Rp. 185.546.000	Rp. 166.145.600	89.54	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 5.999.300	Rp. 5.997.500	99.97	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 40.524.980	Rp. 39.088.900	96.45	
		Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 188.990.200	Rp. 185.087.161	97.93	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 467.453.580	Rp. 405.093.983	86.65	

Total anggaran belanja adalah Rp. 1.151.767.760 dengan realisasi Rp. 1.064.171.144 atau dengan capaian sebesar 92.40% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi yaitu adanya keterlambatan penginputan ke dalam sistem aplikasi yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari DAK-Non Fisik. Hal ini berdampak juga pada kurangnya serapan anggaran DAK-Non Fisik (program perlindungan perempuan dan program perlindungan khusus anak).

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%	100%	105.27%			
Program : Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30%		12.27%	185.546.000	166.145.600	89.54
Program : Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	50%		39.54%	467.453.580	405.093.983	86.65
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Skor pencapaian kota layak anak	750	754.13	100.55%			
Program : Program Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya capaian skor kota layak anak	75%		100.55%	188.990.200	185.087.161	97.93

Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	80%			5.999.300	5.997.500	99.97
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	810	615	75.93%			
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan							
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di Kota Dumai	15%		12.05%	263.253.700	262.758.000	99.81
Program : Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	35%		44%	40.524.980	39.088.900	96.45

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama yaitu cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar* tingkat efisiensinya adalah 1.20% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (105.27%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88.10%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama yaitu skor pencapaian kota layak anak* tingkat efisiensinya adalah 1.02% berasal dari

perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100.55%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.95%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- c. Pada *Indikator Kinerja Utama yaitu skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE)* tingkat efisiensinya adalah 0.78% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (75.93%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.13%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Prestasi dan Penghargaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Kota Layak Anak	Nindya	Nasional	Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Nasional	Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Catatan : Agar dilengkapi dengan dokumentasi dan data dukung dalam penjelasan yang diuraikan. Dapat ditambahkan dengan grafik, diagram, foto dan screenshot gambar sebagai eviden.

BAB IV

PENUTUP

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS PPPA KOTA DUMAI

MAINI ASNA, SKM, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680529 198903 2 002

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada budaya melayu
MISI : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu
SASARAN : Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak dikota Dumai	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)				3187	810	820	830	840	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar dibagi jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang berkunjung di Upt PPA dikali seratus persen	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar dibagi jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang berkunjung di Upt PPA dikali seratus persen			95	95	95	95	95	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Layanan Konseling, Mediasi dan Pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2. Peningkatan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap regulasi Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Perlindungan Khusus Anak		
											Skor Pencapaian Kota Layak Anak	Skor verifikasi administrasi dibagi skor evaluasi mandiri dikali seribu			700	750	800	850	900	Terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak	1. Meningkatkan kualitas anak 2. Pengembangan pusat layanan anak	1. Pemenuhan Hak Anak 2. Program Peningkatan Kualitas		

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

ESSELON II



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	95
		Skor pencapaian Kota Layak Anak	Skor	750
		Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	3862

Sasaran :

Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

I. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	210.263.700
1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	33.001.100
1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp	12.044.400
1.1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp	20.956.700
1 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	97.262.600
1.2. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp	97.262.600
1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	80.000.000
1.3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	80.000.000

II. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp	25.000.000
2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Rp	25.000.000
2.1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	25.000.000
III. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp	5.999.300
3 Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Rp	5.999.300
3.1. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan kabupaten/kota	Rp	5.999.300
IV. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp	24.999.980
4 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	24.999.980
4.1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	13.995.500
4.1. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	11.004.480
V. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp	68.990.200
5 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	6.449.700
5.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	6.449.700
5 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	62.540.500
5.2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	Rp	49.993.300
5.2. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	12.547.200

VI. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp	29.999.580
6 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	29.999.580
6.1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	29.999.580
JUMLAH	Rp	365.252.760

Dumai, Januari 2023

KEPALA,



MAINI ASNA , SKM, M . Si
NIP. 19680529 198903 2 002

ESSELON III



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUWARNI, SH, M. Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS

MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

SUWARNI, SH, M. Si
NIP. 19650930 198603 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	%	100

Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.498.350.434
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.742.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 8.354.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp 5.997.900
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp 1.911.500
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp 3.417.800
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Rp 1.212.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtktisar realisasi kinerja SKPD	Rp 4.786.800
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 6.542.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.371.816.496

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	4.371.816.496
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	214.908.938
Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	5.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	65.286.220
Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	6.560.562
Penyediaan bahan logistik kantor	Rp	21.400.000
penyediaan barang cetak dan pengandaan	Rp	18.515.720
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	7.728.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	90.418.436
Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Rp	125.208.000
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp	125.208.000
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp	616.534.000
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	174.000
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	113.560.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	502.800.000
Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Rp	119.141.000

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Rp	38,530,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp	68,221,000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	5,680,000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	6,710,000
JUMLAH	Rp	5,498,350,434

Dumai, 6 Februari 2023

Pihak Kedua
KEPALA



MANI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19860529 198603 2 002

Pihak Pertama
SEKRETARIS



SUWARNI, SH, M.SI
NIP. 19650930 198603 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. HEPPI SYURYANI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

**MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002**

Dumai, 6 Pebruari 2023
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG DATA
INFORMASI GENDER DAN ANAK

**Dra. HEPPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004**

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	%	35%

Sasaran Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.999.980
Pengumpulan, Pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	
Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	13.995.500
Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupate/kota	11.004.480
Jumlah	24.999.980

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M.SI
NIP. 19680529 198903 2 002

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK



Dra. HEPPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAMLAN, S. Sos, M. Si**
Jabatan : **KABID. PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS

MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN

RAMLAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19701202 200501 1 004

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya Perlindungan bagi Perempuan	%	30

Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

PROGRAM Rp 25.000.000

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 25.000.000

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 25.000.000

Jumlah Rp 25.000.000

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Pihak Kedua
KEPALA


MARNI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002


RAMLAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19790402 199803 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ns. SRI BULAN, S. Kep**

Jabatan : **KABID. PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS

**MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002**

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN
PERLINDUNGAN ANAK

**Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	a. Meningkatnya capaian Kota Layak Anak b. Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	% %	75 85

Sasaran :	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 68.990.200
		Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Rp 6.449.700
		Advokasi kebijakan dan pendampigan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.	Rp 6.449.700
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Rp 62.540.500
		Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.	Rp 49.993.300
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 12.547.200
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 5.999.300
Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 5.999.300		

Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota Rp 5.999.300

Jumlah Rp 74.989.600

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK



Ns.SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI TRIANI INDARI, SKM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Februari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA

SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19790308 200212 2 003

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase ARG di Kota Dumai	%	15

Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	PROGRAM	210.263.700
	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan	33.001.100
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.044.400
	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.956.700
	Pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan	97.262.600
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	97.262.600
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan	80.000.000
	Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayan perempuan kewenangan kabupaten/kota	80.000.000
	Jumlah	210.263.700

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Pertama

**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA**

Pihak Kedua
KEPALA



MAIN ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2002



SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 001

ESSELON IV



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILI KURNIATI, S.Tr, Keb

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SUWARNI, SH,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SUWARNI, SH,M.Si
NIP. 19650930 199003 2 004

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TATA USAHA

LILI KURNIATI, S. Tr, Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	32
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	1
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	paket	1
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	3
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12
	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Unit	11

Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	5.498.350.434
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	50.742.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp	8.354.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp	5.997.900
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp	1.911.500
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp	3.417.800
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Rp	1.212.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	4.786.800
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	6.542.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.371.816.496
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	4.371.816.496
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	214.908.938	
Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan	Rp	5.000.000	

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	65.286.220
Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	6.560.562
Penyediaan bahan logistik kantor	Rp	21.400.000
penyediaan barang cetak dan pengadaan	Rp	18.515.720
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	7.728.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	90.418.436
Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Rp	125.208.000
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp	125.208.000
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp	616.534.000
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	174.000
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	113.560.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	502.800.000
Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Rp	119.141.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Rp	38.530.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Rp	68.221.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Rp	5.680.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	Rp	6.710.000
Jumlah	Rp	5.498.350.434

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS



SUWARNI, SH.M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

Pihak Pertama
KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**

Jabatan : **KEPALA UPT PPA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PPPA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PPPA

**MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP.19680529 198903 2 002**

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

**FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007**

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	Orang	50

Sasara: Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Program Perlindungan Khusus Anak Rp 29.999.580

Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota Rp 29.999.580

Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Rp 29.999.580

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PPPA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP.19680529 198903 2 002

Pihak Pertama
KEPALA UPT PPA



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RESTI EKO YULIANTI, AMK**

Jabatan : **KEPALA SUBBAG TATA USAHA UPT PPA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**

Jabatan : **KEPALA UPT PPA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PPA

**FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007**

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAG TATA USAHA UPT PPA

**RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP.19800725 200604 2 017**

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	Orang	50

Dumai, 6 Februari 2023

Pihak Kedua
KEPALA UPT PPA



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007

Pihak Pertama
KEPALA SUBBAG TU UPT PPA



RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP. 19800725 200604 2 017

FUNGSIONAL



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP**

Jabatan : **PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **SUWARNI, SH, M. Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 06 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

**SUWARNI, SH, M. Si
NIP. 19650930 198603 2 005**

PIHAK PERTAMA
PERENCANA AHLI MUDA

**NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2 001**

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	4
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1

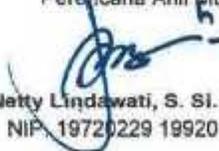
Dumai, 6 Februari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris



SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

Pihak Pertama
Perencana Ahli Muda



Netty Lindawati, S. Si. T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUNI WELDA, SE**

Jabatan : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **SUWARNI, SH, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA

YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	32 orang / bulan

Dumai, 6 Februari 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS


SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

Pihak Pertama
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA


YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. SURNIATI**
Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Ns. SRI BULAN, S. Kep**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 1988112 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	92

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMENUHAN
HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN
ANAK



Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Dumai, 6 Februari 2023
Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **dr. DEVY DIANNY. M. K. M**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Ns. SRI BULAN, S. Kep**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Ns. SRI BULAN, S. Kep,
NIP. 19680414 198811 2 001**

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**Dr. DEVY DIANNY. M. K. M
NIP. 19750313 201001 2 011**

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaannya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1
		Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



Ns. SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



dr. DEVY DIANNY, M. K. M
NIP. 19750313 201001 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ns. KOMALA SARI, S. Kep. M. K. M**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Ns. SRI BULAN, S. Kep**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Ns. KOMALA SARI, S. Kep. M. K. M
NIP. 19780418 200501 2 007

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK



Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Ns. KOMALA SARI, S. Kep. M. K. M
NIP. 19780418 200501 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. NURMIATI**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Dra. HEPPI SYURYANI**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK.

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

**Dra. HEPPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004**

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005**

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	3

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

Pihak Pertama

Analisis Kebijakan Ahli Muda



Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI DUMAYATI, A.Md**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Dra. HEPPI SYURYANI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

Dra. HEPPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SRI DUMAYATI, A.Md
NIP.19710128 200003 2 006

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di <u>kewenangan kabupaten/kota</u> Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen Dokumen	3 3

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK**



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

Dumai, 6 Februari 2023

Pihak Pertama
NALIS KEBLAKAN AHLI MUD



SRI DUMAYATI, A. Md
NIP. 19710128 200003 2 006



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAN ANNA FITRIYAH, SKM**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Dra. HEPPI SYURYANI**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER
DAN ANAK

Dra. HEPPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

PIHAK PERTAMA
ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3
		Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	3

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK**



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

Pihak Pertama
NALIS KEBIJAKAN AHLI MUD



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI YASMANIDAR, SKM**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **SRI TRIANI INDARI, SKM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PKHPKK



SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 003

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



DEWI YASMANIDAR, SKM
NIP. 19690826 199303 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Perangkat daerah	37
		Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Perangkat daerah	37

Dumai, 6 Februari 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA**


SRI TRIANTI DARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


DEWI YASMANIDAR, SKM
NIP. 19690826 199303 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVA KURNIASARY, SE**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **SRI TRIANI INDARI, SKM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP.19691022 198911 2 001


NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 001

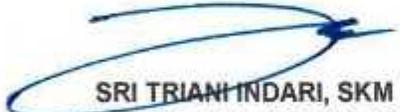
Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	3

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA**


SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKMALIA YARNELINUR, SKM**
Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **SRI TRIANI INDARI, SKM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA



SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP.19691022 198911 2 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 19821123 200501 2 004

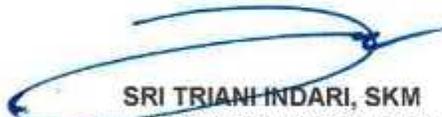
Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1

Dumai, 6 Februari 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA**


SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP 19821123 200501 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ns. ISRA MIARTI, S. Kep**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **RAMLAN, S. Sos, M. Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PHP

RAMLAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19701202 200501 1 004

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Ns. ISRA MIARTI, S. Kep
NIP. 19750805 200312 2 011

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
HAK PEREMPUAN**


RAMLAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19701202 200501 1 004

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


Ns. ISRA MIARTI, S. Kep
NIP.19750805 200312 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAN HAMELDA, SST**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **RAMLAN, S. Sos, M. Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PHP

RAMLAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19701202 200501 1 004

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1

Dumai, 6 Pebruari 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN**

RAMLAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19701202 200501 1 004

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURNI ASNITA, S. Sos, M. Si**
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **RAMLAN, S. Sos, M. Si**
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023.

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG RHP

RAMLAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19701202 200501 1 004

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

MURNI ASNITA, S. Sos, M. Si
NIP. 19790826 200604 2 005

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota	Dokumen	1

Dumai, 6 Pebruari 2023

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
HAK PEREMPUAN



RAMLAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19701202 200501 1 004

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



MURNI ASNITA, S. Sos, M. Si
NIP. 19790826 200604 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**

Jabatan : **ANALIS TATA USAHA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **LILI KURNIATI, S.Tr. Keb**

Jabatan : **KASUBBAG TATA USAHA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KASUBBAG TATA USAHA

LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

PIHAK PERTAMA
ANALIS TATA USAHA

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Mengarsipkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha	14 Dokumen	Melakukan pengarsipan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha
			2 Mengarsipkan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN)	28 Dokumen	Melakukan pengarsipan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN)
			3 Membantu Mengevaluasi data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan	24 Dokumen	Membantu pengevaluasian data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan
			4 Membantu Menyiapkan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan	100 Lembar	Membantu mempersiapkan surat menyurat/ naskah dinas dan kearsipan
			5 Mengarsipkan surat masuk/ yang telah didisposisi dan surat keluar	100 Lembar	Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang telah didisposisi

Dumai, 6 Februari 2023
 PELEKSA

KASUBBAG TATA USAHA

LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
 NIP. 19770727 200604 2 021


DARNITAWATI, S. Sos
 NIP. 19660420 199202 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LINDA NATARIA, AMK**

Jabatan : **PELAKSANA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **LILI KURNIATI, S.Tr. Keb**

Jabatan : **KASUBBAG TATA USAHA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KASUBBAG TATA USAHA

**LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021**

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

**LINDA NATARIA, AMK
NIP. 19860616 201001 2 038**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Mengarsipkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha 2 Mengarsipkan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN) 3 Membantu Mengevaluasi data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan 4 Membantu Menyiapkan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan 5 Mengarsipkan surat masuk/ yang telah didisposisi dan surat keluar	14 Dokumen 28 Dokumen 24 Dokumen 100 Lembar 100 Lembar	Melakukan pengarsipan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha Melakukan pengarsipan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN) Membantu mengevaluasi data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan Membantu mempersiapkan surat menyurat/ naskah dinas dan kearsipan Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang telah didisposisi

KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S.Tr. Keb
 NIP. 19770727 200604 2 021

PELAKSANA



LINDA NATARIA, AMK
 NIP. 19860616 201001 2 038



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENI YUSNITA, SST

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : YUNI WELDA, SE

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA

YUNI WELDA, SE
NIP. 1977060614 200501 2 006

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

ENI YUSNITA, SST
NIP. 19821025 200701 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2 Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota Dumai	3 Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	4 1 Membuat registrasi SPP, SPM untuk gaji, tambahan penghasilan dan kegiatan Tahun 2023 2 Melakukan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) LS, UP dan GU kepada pengguna anggaran berdasarkan DPA dan anggaran kas Tahun 2023 3 Melakukan pemeriksaan kelengkapan GU dan melakukan pembayaran kepada PPTK setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran sesuai ketentuan berlaku 4 Melakukan pemotongan dan pembayaran pajak kepada kas negara 5 Mencatat seluruh pengeluaran berdasarkan SP2D yang diterima dan tanda bukti pengeluaran yang sah kedalam buku kas umum 6 Membuat laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Secara Non Tunai Tahun 2023 7 Membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) fungsional	5 50 Berkas 50 Berkas 500 Kwitansi 450 SSP 500 Kwitansi 12 Berkas 150 Kegiatan	6 Pendokumentasian registrasi SPP, SPM untuk gaji, tambahan penghasilan dan kegiatan Tahun 2023 Pendokumentasian pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) LS, UP dan GU kepada pengguna anggaran berdasarkan DPA dan anggaran kas Tahun 2023 Pendokumentasian kelengkapan GU dan serah terima pembayaran kepada PPTK setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran sesuai ketentuan berlaku Pendokumentasian Daftar Transaksi Harian Belanja dan Pendokumentasian rekapitulasi transaksi harian belanja daerah Tahun 2023 Pendokumentasian seluruh pengeluaran berdasarkan SP2D yang diterima dan pendokumentasian tanda bukti pengeluaran yang sah kedalam buku kas umum Pendokumentasian laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Secara Non Tunai Tahun 2023 Pengeinputan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional

	8	Membantu mendokumentasikan seluruh tanda bukti pengeluaran serta dokumen lain secara tertib dan teratur	50 Berkas	Pendokumentasian seluruh tanda bukti pengeluaran serta dokumen lain secara tertib dan teratur
	9	Membuat laporan tahunan pertanggung jawaban keuangan kepada anggaran melalui PPK SKPD	1 Dokumen	Pendokumentasian laporan tahunan pertanggung jawaban keuangan kepada anggaran melalui PPK SKPD

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA



YUNI WELDA, SE

NIP. 19770614 200501 2 008

Dumai, 6 Pebruari 2023

PELAKSANA



ENI YUSNITA

NIP. 196210525 200501 2 009



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb**

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YUNI WELDA, SE**

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEUANGAN

YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb
NIP. 19760329 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> Membantu Penginputan Aliran Kas Anggaran Perubahan Tahun 2023 Membantu menyiapkan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Membantu menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah Membantu membuat laporan inventarisasi Membantu menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran tugas Membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah serta sarana program Membantu menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Berkas 	Pendokumentasian Penginputan Aliran Kas Anggaran Perubahan Tahun 2023 Pendokumentasian menyiapkan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Pendokumentasian menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah Pendokumentasian membuat laporan inventarisasi Pendokumentasian menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran tugas Pendokumentasian menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah serta sarana program Pendokumentasian menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya

Dumai, 6 Februari 2023

PELAKSANA


RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb
 NIP. 19760329 201001 2 001

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH-AHLI MUDA



YUNI WEJDA, SE.
 NIP. 19770614 200501 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YENNI MARLINA, S.Sos**

Jabatan : **ANALIS PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **WAN HAMELDA, SST**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005

PIHAK PERTAMA
ANALIS PERENCANA

YENNI MARLINA, S.Sos
NIP. 19790326 200701 2 005

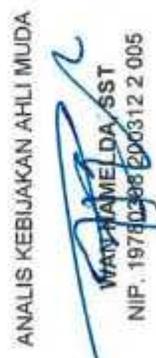
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Membantu membuat rencana Kegiatan Anggaran dan Penginputan Anggaran Tahun 2023 dan Penginputan Perubahan Anggaran Tahun 2023 2 Membantu membuat konsep kegiatan di bidang PHP 3 Membantu membuat SK kegiatan dibidang PHP 4 Membantu membuat indikator kinerja th 2023 untuk th 2023 5 Membantu Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas 6 Membantu Mengadakan rapat Koordinasi dengan Kecamatan 7 Membantu Melaksanakan rapat Koordinasi dengan Kelurahan 8 Membantu Melaksanakan Kegiatan penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak 9 Membantu Membuat Laporan Kegiatan 10 Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar Bidang Perlindungan Hak Perempuan	1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Berkas 1 Laporan 4 Kegiatan 20 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20 Surat	Pendokumentasian rencana Kegiatan Anggaran dan Penginputan Anggaran Perubahan Tahun 2023 Pendokumentasian konsep kegiatan di bidang PHP Pendokumentasian SK Kegiatan di Bidang PHP Pendokumentasian Indikator Kinerja Tahun 2023 untuk Tahun 2023 Pendokumentasian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pendokumentasian rapat Koordinasi di Kecamatan Pendokumentasian rapat Koordinasi di Kelurahan Pendokumentasian Kegiatan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Pendokumentasian Laporan Kegiatan Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Dumai, 6 Februari 2023
ANALIS BERENCANA


YENNI MARCINA, S.Sos
NIP. 197903262007012005

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WATI JAME DA SST
NIP. 197903082003122005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASTIEN SARI NOVA, S. Kep**

Jabatan : **PELAKSANA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **AKMALIA YARNELINUR, SKM**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 19821123 200501 2 004**

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

**ASTIEN SARI NOVA, S.Kep
NIP. 19811115 201001 2 010**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan.	<ol style="list-style-type: none"> Membantu membuat konsep kegiatan di bidang PKHPKK Membantu membuat SK kegiatan dibidang PKHPKK Membantu Melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG Membantu Membuat Laporan Kegiatan Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar bidang PKHPKK 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Surat 	Pendokumentasian konsep kegiatan di bidang PKHPKK Pendokumentasian SK Kegiatan di bidang PKHPKK Pendokumentasian kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG Pendokumentasian Laporan Kegiatan Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang PKHPKK

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AKMALIA YARNELINUR, SKM
 NIP. 19821123 200501 2 004

Dumai, 6 Pebruari 2023
 PELAKSANA



ASTIEN SARI NOVA, S.Kep
 NIP. 19811115 201001 2 010



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S. Psi**

Jabatan : **PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**

Jabatan : **KEPALA UPT PPA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PPA

**FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007**

PIHAK PERTAMA
PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK

**WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S. Psi
NIP. 19930923 202012 2 018**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2 Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota dumi	3 Meningkatnya pelaksanaan penganusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	4 1 Mengumpulkan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus 2 Menerima pengaduan 3 Menyiapkan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio, kamera, dll) 4 Memeriksa kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir 5 Mengadministrasi aduan kedalam buku register / formulir 6 Mempersiapkan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus 7 Menyusun surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan	5 50 kasus 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban	6 Melakukan pengumpulan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus Melakukan penerimaan pengaduan Melakukan persiapan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio, kamera, dll) Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir Melakukan pengadministrasian aduan kedalam buku register / formulir Melakukan persiapan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus Melakukan penyusunan surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan Melakukan pemindahan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA Melakukan pendampingan korban di lembaga Hukum

KEPALA LPT PPA



FAJARIA RUSMEITY, SKM
 NIP. 19780524 200501 2 007

Dumai, 6 Februari 2023
 PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK



WIDYA ANUGRAH WIMAN SARI, S.Psi
 NIP. 19930923 202012 2 018



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYILVIYANTI, SST**

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **WAN ANNA FITRIYAH, SKM**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 6 Pebruari 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

**WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004**

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

**SYILVIYANTI, SST
NIP. 19830105 200501 2 003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN 2	SASARAN 3	INDIKATOR KINERJA 4	TARGET 5	KEGIATAN 6	
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1	Membantu Pendataan Kelembagaan Organisasi Perempuan, Gender dan Anak	1 Dokumen	Pendokumentasian Data Kelembagaan Organisasi Perempuan Gender dan Anak
2			Membantu Pendataan Gender dan Anak	1 Dokumen	Pendokumentasian Data Gender dan Anak	
3			Membantu Membuat Laporan Kegiatan	2 Kegiatan	Pendokumentasian Laporan Kegiatan	
4			Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar bidang Data	15 Surat	Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang Data	

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Anna S.

WAN ANNA FITRIYAH, SKM
 NIP. 19780430 200003 2 004

Dumai, 6 Februari 2023
 PELAKSANA

Syilviyanti

SYILVIYANTI, SST
 NIP. 19830105 200501 2 003

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DARI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

ESSELON II

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2023	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standart Skor pencapaian Kota Layak Anak	%	95
		Skor pencapaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	skor	3862

Dumai, Januari 2023
Pihak Pertama
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
DNIP. 19680529 198603 2 002

ESSELON III

**RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100

Dumai, 6 Februari 2023
SEKRETARIS



SUWARNI, SH, M. Si
NIP. 19650930 198603 2 005

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaannya Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak di Kota Dumi	(4) %	(5) 35

Dumai, 6 Pebruari 2023
KEPALA BIDANG
DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK



Dra. HEPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	(4) %	(5) 30

Dumai, 6 Februari 2023

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN



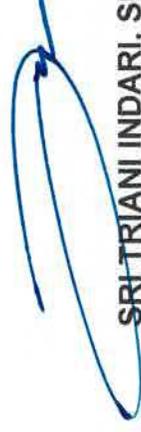
RAMLAN, S. Sos, M. Si

NIP. 19701202 200501 1 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON III
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Persentase ARG di Kota Dumai	(4) %	(5) 10

**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA**



**SRI-TRIANI INDARI, SKM
NIP.19691022 198911 2 001**

ESSELON IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN ESSELON IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	<p>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</p> <p>Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD</p> <p>Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</p> <p>Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</p> <p>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</p> <p>Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang</p> <p>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan</p> <p>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</p> <p>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</p>	<p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p> <p>Orang</p> <p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>32</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>3</p>

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60
	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12
	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Unit	11
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1

Dumai, 6 Pebruari 2023
KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten / kota	Orang	50

Dumai, 6 Pebruari 2023
KEPALA UPT DPPPA



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19830606 200904 2 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	(4) Orang	(5) 50

Dumai, Januari 2023
KEPALA SUBBAG TU UPT DPPP



RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP. 19800725 200604 2 017

FUNGSIONAL

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Sub Kegiatan (3)	Satuan (4)	Target Tahunan 2023 (5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	a. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah b. Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD c. Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD e. Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD f. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD g. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Laporan	3 2 2 2 1 4 1

Dumai, 6 Pebruari 2023
PERENCANA AHLI MUDA


NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahunan 2023
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang

Dumai, 6 Pebruari 2023
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA



YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	(4) Organisasi	(4) 92

Dumai, 6 Pebruari 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan perlindungan dan anak dari tindak kekerasan	a. Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota b. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
			Dokumen	2

Dumai, 6 Februari 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



dr. DEVY DIANNY, M.K.M
NIP.19750313 201001 2 011

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) 1. Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(4) Laporan Dokumen	(4) 1 2

Dumai, 6 Pebruari 2023

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Ns. KOMALA SARI, S. Kep. M. K. M

NIP. 19780418 200501 2 007

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	(4) Dokumen	(5) 3

Dumai, 6 Pebruari 2023
Analis Kebijakan Ahli Muda



Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) A. Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten/Kota B. Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	(4) Dokumen Dokumen	(5) 3 3

Dumai, 6 Pebruari 2023
Analis Kebijakan Ahli Muda

SRI DUMAYATI, A.Md
NIP. 19710128 200003 2 006

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	3

Dumai, 6 Pebruari 2023
 Analis Kebijakan Ahli Muda



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
 NIP. 19780430 200003 2 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) a. Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten / Kota PPRG diseluruh Perangkat Daerah b. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	(4) Perangkat Daerah	(5) 37

Dumai, 6 Februari 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



DEWI YASMAINIDAR, SKM
NIP. 19690826 199303 2 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembagian serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	(4) Dokumen	(5) 3

Dumai, 6 Februari 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunanserta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	(4) Dokumen	(5) 1

Dumai, 6 Pebruari 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP : 19821123 200501 2 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	(4) Dokumen	(5) 1

Dumai, 6 Pebruari 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Ns. ISRA MIARTI, S. Kep
NIP.19750805 200312 2 011

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Dokumen	1

Dumai, 6 Pebruari 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



WAN HAMELDA, SST
NIP.19780308 200312 2 005

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1) 1	(2) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(3) Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak	(4) Dokumen	(5) 1

Dumai, 6 Februari 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



MURNI ASNITA, S. Sos, M.Si
NIP. 19790826 200604 2 005

ESSELON II



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM. MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,

H. PAISAL, SKM. MARS

PIHAK PERTAMA,


MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	95
		Skor pencapaian Kota Layak Anak	Skor	750
		Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Skor	810

Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

I. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	263,253,700
1.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	85,991,100
1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	52,990,000
1.1.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp	12,044,400
1.1.3 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp	20,956,700
1.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	97,262,600
1.2.1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp	97,262,600
1.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	80,000,000
1.3.1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	80,000,000
II. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp	185,546,000
2.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	67,908,000
2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		67,908,000
2.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	92,638,000
2.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	92,638,000
2.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	25,000,000

2.3.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota	Rp	25,000,000
III.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp	5,999,300
3.1	<i>Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota</i>	Rp	5,999,300
3.1.1	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan kabupaten/kota	Rp	5,999,300
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp	40,524,980
4.1	<i>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	Rp	40,524,980
4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	29,520,500
4.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	11,004,480
V.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp	188,990,200
5.1	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	Rp	6,449,700
5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	6,449,700
5.2	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	Rp	182,540,500
5.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	40,000,000
5.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	129,993,300
5.2.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	12,547,200
VI.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp	467,453,580
6.1	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	81,592,000
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	81,592,000
6.2	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	284,201,580
6.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	29,999,580
6.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	254,202,000

6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah/Kota	Rp	101,660,000
6.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	101,660,000

Jumlah

Rp 1,151,767,760

Dumai, 25 September 2023



Pihak Kedua

H. PAISAL, SKM. MARS



Pihak Pertama
KEPALA

MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

ESSELON III



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUWARNI, SH, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS

SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	%	100

Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6,515,124,778
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp 32,222,000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 8,354,000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp 5,997,900
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp 1,911,500
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp 3,417,800
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Rp 1,212,000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Rp 4,786,800
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 6,542,000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp 4,644,387,571
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 4,644,387,571
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp 361,487,506
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 5,000,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 73,925,001
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 14,523,553
	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 47,803,647
	penyediaan barang cetak dan pengadaan	Rp 18,515,720

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	7,728,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	193,991,585
Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Rp	498,532,581
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp	125,208,000
Pengadaan Mebel	Rp	55,648,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	85,998,492
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	231,678,089
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp	844,354,120
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	174,000
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	99,160,000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	745,020,120
Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Rp	134,141,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Rp	38,530,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp	83,221,000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	5,680,000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	6,710,000
JUMLAH	Rp	6,515,124,778

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
KEPALA

Pihak Pertama
SEKRETARIS



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19860529 198603 2 002



SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUSNIDAR, SKM**

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS

JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	%	100

Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

**PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN / KOTA**

Rp 6,515,124,778

***Perencanaan,
Penggangan, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah***

Rp 32,222,000

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Rp 8,354,000

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Rp 5,997,900

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Rp 1,911,500

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Rp 3,417,800

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD

Rp 1,212,000

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

Rp 4,786,800

Evaluasi kinerja perangkat daerah

Rp 6,542,000

***Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah***

Rp 4,644,387,571

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Rp 4,644,387,571

***Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah***

Rp 361,487,506

Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Rp 5,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rp 73,925,001

Penyediaan peralatan rumah tangga

Rp 14,523,553

Penyediaan bahan logistik kantor

Rp 47,803,647

penyediaan barang cetak dan pengadaan

Rp 18,515,720

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	7,728,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	193,991,585
Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Rp	498,532,581
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp	125,208,000
Pengadaan Mebel	Rp	55,648,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	85,998,492
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	231,678,089
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp	844,354,120
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	174,000
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	99,160,000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	745,020,120
Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Rp	134,141,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Rp	38,530,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp	83,221,000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	5,680,000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	6,710,000
JUMLAH	Rp	6,515,124,778

Dumai, 02 Oktober 2023

Pihak Pertama
SEKRETARIS



JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004



Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19860529 198603 2 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. HEPPY SYURYANI**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	%	35%

Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

**PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM DATA
GENDER DAN
ANAK** **40,524,980**

***Pengumpulan,
Pengolahan
analisis dan
penyajian data
gender dan anak
dalam
kelembagaan
data di tingkat
daerah
kabupaten/kota*** **40,524,980**

Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota 29,520,500

Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota 11,004,480

Jumlah **40,524,980**

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
KEPALA



MAIMI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK**



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19650930 199003 2 004

Lampiran

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	%	35%

Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

**PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM DATA
GENDER DAN
ANAK** **40,524,980**

***Pengumpulan,
Pengolahan
analisis dan
penyajian data
gender dan anak
dalam
kelembagaan
data di tingkat
daerah
kabupaten/kota*** **40,524,980**

Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota 29,520,500

Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota 11,004,480

Jumlah **40,524,980**

Dumai, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua
KEPALA



MAINE ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002



Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK**



YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ns. SRI BULAN, S. Kep**

Jabatan : KABID. PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

Ns. SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Lampiran

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya capaian Kota Layak Anak	%	75
2		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	%	80

Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 188,990,200
	<i>Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota</i>	Rp 6,449,700
	Advokasi kebijakan dan pendampigan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.	Rp 6,449,700
	<i>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota</i>	Rp 182,540,500
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 40,000,000
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.	Rp 129,993,300
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 12,547,200	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 5,999,300

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota Rp **5,999,300**

Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota Rp 5,999,300

Jumlah Rp 194,989,500

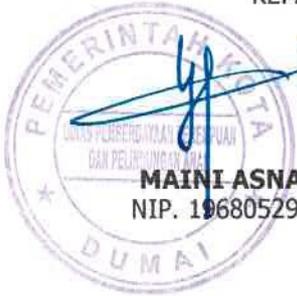
Dumai, 25 September 2023

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVA KURNIASARY, SE**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN
KELUARGA

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase ARG di Kota Dumai	%	15

Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

**PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN** **Rp 263,253,700**

***Pelebagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
lembaga pemerintah
kewenangan
kabupaten/kota*** **Rp 85,991,100**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 52,990,000

Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG Rp 12,044,400

Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG Rp 20,956,700

Pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota **Rp 97,262,600**

Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Rp 97,262,600

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota **Rp 80,000,000**

Pengembangan
komunikasi, informasi, dan
edukasi (KIE)
pemberdayaan perempuan
kewenangan
kabupaten/kota
Jumlah Rp 80,000,000
263,253,700

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2002

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA**

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M. Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN


MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 1 002


DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya Perlindungan bagi Perempuan	%	30

Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

PROGRAM Rp **185,546,000**

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp **67,908,000**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp 67,908,000

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp **92,638,000**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 92,638,000

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp **25,000,000**

Penguatan Jejaring antar Rp 25,000,000
Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Rp 185,546,000

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua

KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Perlindungan
Hak Perempuan**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Darnitawati', is written over the text of the first party.

DARNITAWATI, S.Sos
NIP.19660420 199202 2 001

ESSELON IV



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**

Jabatan : KEPALA UPT PPA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PPPA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PPPA



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP.19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN

FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	Orang	50
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7

Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Program Perlindungan Khusus Anak Rp **284,201,580**

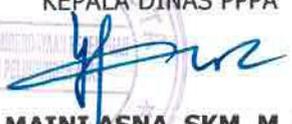
Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota Rp **284,201,580**

Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Rp 29,999,580

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 254,202,000

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PPPA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP.19680529 198903 2 002

Pihak Pertama
KEPALA UPT PPA



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LILI KURNIATI, S.Tr, Keb.**

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **SUWARNI, SH, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TATA USAHA

LILI KURNIATI, S. Tr, Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	1
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	1
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	3
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1
		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	14
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	8
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1
		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Unit	11

Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

**PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA** **Rp 6,515,124,778**

***Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah*** **Rp 361,487,506**

Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Rp 5,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 73,925,001

Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 14,523,553

Penyediaan bahan logistik kantor Rp 47,803,647

penyediaan barang cetak dan pengandaan Rp 18,515,720

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 7,728,000

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp 193,991,585

***Kegiatan Pengadaan Barang
milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah*** **Rp 498,532,581**

Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Rp 125,208,000

Pengadaan Mebel Rp 55,648,000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 85,998,492

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 231,678,089

***Kegiatan Penyediaan jasa
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah*** **Rp 844,354,120**

Penyediaan jasa surat menyurat Rp 174,000

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 99,160,000

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp 745,020,120

***Kegiatan Pemeliharaan barang
milik Daerah Penunjang
Urusan pemerintah Daerah*** **Rp 134,141,000**

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan Rp 38,530,000

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp 83,221,000

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp 5,680,000

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp 6,710,000

***Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah*** **Rp 4,644,387,571**

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp 4,644,387,571

**Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah** Rp 32,222,000

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp	8,354,000
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp	5,997,900
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp	1,911,500
Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp	3,417,800
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Rp	1,212,000
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi	Rp	4,786,800
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	6,542,000

Jumlah Rp 6,515,124,778

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS



SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

Pihak Pertama

KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LILI KURNIATI, S.Tr, Keb.**

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **JUSNIDAR, SKM**

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TATA USAHA

JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004

LILI KURNIATI, S. Tr, Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	1
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	1
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	3
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1
		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	14
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	8
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1
		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Unit	11

Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	6,515,124,778
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp	361,487,506
Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	5,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	73,925,001
Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	14,523,553
Penyediaan bahan logistik kantor	Rp	47,803,647
penyediaan barang cetak dan pengandaan	Rp	18,515,720
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	7,728,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	193,991,585
<i>Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah</i>	Rp	498,532,581
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp	125,208,000
Pengadaan Mebel	Rp	55,648,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	85,998,492
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	231,678,089
<i>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp	844,354,120
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	174,000
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	99,160,000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	745,020,120
<i>Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</i>	Rp	134,141,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kenderaan Dinas jabatan	Rp	38,530,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp	83,221,000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	5,680,000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	6,710,000
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp	4,644,387,571
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	4,644,387,571

**Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah** Rp **32,222,000**

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp	8,354,000
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp	5,997,900
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp	1,911,500
Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp	3,417,800
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Rp	1,212,000
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi	Rp	4,786,800
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	6,542,000

Jumlah Rp **6,515,124,778**

Dumai, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua

SEKRETARIS



JUSNIDAR, SKM

NIP. 19750923 199703 2 004

Pihak Pertama

KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S. Tr. Keb

NIP. 19770727 200604 2 021



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RESTI EKO YULIANTI, AMK**

Jabatan : KEPALA SUBBAG TATA USAHA UPT PPA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**

Jabatan : KEPALA UPT PPA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PPA

**FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007**

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAG TATA USAHA UPT PPA

**RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP.19800725 200604 2 017**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	Orang	50
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
KEPALA UPT PPA



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007

Pihak Pertama
KEPALA SUBBAG TU UPT PPA



RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP. 19800725 200604 2 017

FUNGSIONAL



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP**

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **SUWARNI, SH, M. Si**

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SUWARNI, SH, M. Si
NIP. 19650930 198603 2 005

PIHAK PERTAMA
PERENCANA AHLI MUDA

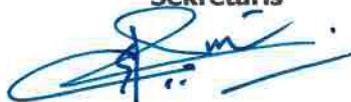
NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
Sekretaris



SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

Pihak Pertama
PERENCANA AHLI MUDA



Netty Lindawati, S. Si. T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP**

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **JUSNIDAR, SKM**

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004

PIHAK PERTAMA
PERENCANA AHLI MUDA

NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1

Dumai, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua
Sekretaris



JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004

Pihak Pertama
PERENCANA AHLI MUDA



Netty Lindawati, S. Si. T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **dr. DEVY DIANNY. M. K. M**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Ns. SRI BULAN, S. Kep**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ns. SRI BULAN, S. Kep.
NIP. 19680414 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dr. DEVY DIANNY. M. K. M
NIP. 19750313 201001 2 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaannya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2

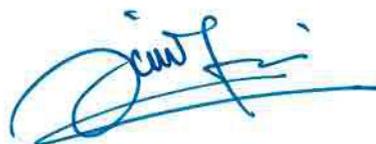
Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PEMENUHAN HAK ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Ns. SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



dr. DEVY DIANNY, M. K. M
NIP. 19750313 201001 2 011



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURNI ASNITA, S. Sos, M. Si**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PHP

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

MURNI ASNITA, S. Sos, M.Si
NIP. 19790826 200604 2 005

Lampiran

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota	Dokumen	1

Dumai, 25 September 2023

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
HAK PEREMPUAN



DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



MURNI ASNITA, S. Sos, M. Si
NIP. 19790826 200604 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. SURNIATI**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Ns. SRI BULAN, S. Kep**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 1988112 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	4
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK



Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Dumai, 25 September 2023

Pihak Pertama

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. NURMIATI**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Dra. HEPPY SYURYANI**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK.

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

**Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004**

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005**

Lampiran

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	3

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

Dumai, 25 September 2023

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Muda



Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. NURMIATI**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK.

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005

Lampiran

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	3

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK


YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

Dumai, 02 Oktober 2023

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Muda


Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI YASMANIDAR, SKM**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **NOVA KURNIASARY, SE**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PKHPKK

**NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011**

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**DEWI YASMANIDAR, SKM
NIP. 19690826 199303 2 004**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Perangkat daerah	10
		Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Perangkat daerah	20

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA**


NOVA KURNIASARY, SE
 NIP. 19721102 200604 2 011

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


DEWI YASMANIDAR, SKM
 NIP. 19690826 199303 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAN ANNA FITRIYAH, SKM**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Dra. HEPPY SYURYANI**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

**Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19790817 200904 2 003**

PIHAK PERTAMA
ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3
		Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK**



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAN ANNA FITRIYAH, SKM**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

**YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003**

PIHAK PERTAMA
ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3
		Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1

Dumai, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK**



YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19650930 199003 2 004

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ns. ISRA MIARTI, S. Kep**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PHP

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Ns. ISRA MIARTI, S. Kep
NIP. 19750805 200312 2 011

Lampiran

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN HAK**


DARNITAWATI, S.Sos
NIP.19660420 199202 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


Ns. ISRA MIARTI, S. Kep
NIP.19750805 200312 2 011



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAN HAMELDA, SST**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PHP

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19701202 200501 1 004

WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
HAK PEREMPUAN**


DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI DUMAYATI, A.Md**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Dra. HEPPY SYURYANI**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

**Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004**

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**SRI DUMAYATI, A.Md
NIP.19710128 200003 2 006**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	3
		Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK**



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



SRI DUMAYATI, A. Md
NIP.19710128 200003 2 006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI DUMAYATI, A.Md**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc**

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SRI DUMAYATI, A.Md
NIP.19710128 200003 2 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	3
		Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1

Dumai, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK**

YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SRI DUMAYATI, A. Md
NIP.19710128 200003 2 006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKMALIA YARNELINUR, SKM**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **NOVA KURNIASARY, SE**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA

**NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011**

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 19821123 200501 2 004**

Lampiran

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA**


NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 19821123 200501 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUNI WELDA, SE**

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **JUSNIDAR, SKM**

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA

YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkarnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	32 orang / bulan

Dumai, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS



JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004

Pihak Pertama
**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA**



YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUNI WELDA, SE**

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **SUWARNI, SH, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA

YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkarnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	32 orang / bulan

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS



SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

Pihak Pertama
**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA**



YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ns. KOMALA SARI, S. Kep. M. K. M**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Ns. SRI BULAN, S. Kep**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Ns. KOMALA SARI, S. Kep. M. K. M
NIP. 19780418 200501 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua

**KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Pertama

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Ns. KOMALA SARI, S. Kep. M. K. M
NIP. 19780418 200501 2 007

PELAKSANA



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYILVIYANTI, SST**

Jabatan : ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **WAN ANNA FITRIYAH, SKM**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

SYILVIYANTI, SST
NIP. 19830105 200501 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Membantu Pendataan Kelembagaan Organisasi Perempuan, Gender dan Anak 2 Membantu Pendataan Gender dan Anak 3 Membantu Membuat Laporan Kegiatan	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kegiatan	Pendokumentasian Data Kelembagaan Organisasi Perempuan Gender dan Anak Pendokumentasian Data Gender dan Anak Pendokumentasian Laporan Kegiatan

Dumai, 25 September 2023
 PELAKSANA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
 NIP. 19780430 200003 2 004



SYILVIYANTI, SST
 NIP. 19830105 200501 2 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ENI YUSNITA, SST**

Jabatan : ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YUNI WELDA, SE**

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA

YUNI WELDA, SE
NIP. 1977060614 200501 2 006

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

ENI YUSNITA, SST
NIP. 19821025 200701 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> Membuat registrasi SPP, SPM untuk gaji, tambahan penghasilan dan kegiatan Tahun 2023 Melakukan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) LS, UP dan GU kepada pengguna anggaran berdasarkan DPA dan anggaran kas Tahun 2023 Melakukan pemeriksaan kelengkapan GU dan melakukan pembayaran kepada PPTK setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran sesuai ketentuan berlaku Melakukan pemotongan dan pembayaran pajak kepada kas negara Mencatat seluruh pengeluaran berdasarkan SP2D yang diterima dan tanda bukti pengeluaran yang sah kedalam buku kas umum Membuat laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Secara Non Tunai Tahun 2023 Membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) fungsional Membantu mendokumentasikan seluruh tanda bukti pengeluaran serta dokumen lain secara tertib dan teratur 	<ol style="list-style-type: none"> 50 Berkas 50 Berkas 500 Kwitansi 450 SSP 500 Kwitansi 12 Berkas 150 Kegiatan 50 Berkas 	<ol style="list-style-type: none"> Pendokumentasian registrasi SPP, SPM untuk gaji, tambahan penghasilan dan kegiatan Tahun 2023 Pendokumentasian pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) LS, UP dan GU kepada pengguna anggaran berdasarkan DPA dan anggaran kas Tahun 2023 Pendokumentasian kelengkapan GU dan serah terima pembayaran kepada PPTK setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran sesuai ketentuan berlaku Pendokumentasian Daftar Transaksi Harian Belanja dan Pendokumentasian rekapitulasi transaksi harian belanja daerah Tahun 2023 Pendokumentasian seluruh pengeluaran berdasarkan SP2D yang diterima dan pendokumentasian tanda bukti pengeluaran yang sah kedalam buku kas umum Pendokumentasian laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Secara Non Tunai Tahun 2023 Penginputan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional Pendokumentasian seluruh tanda bukti pengeluaran serta dokumen lain secara tertib dan teratur

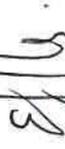
		9	Membuat laporan tahunan bertanggung jawab keuangan kepada anggaran melalui PPK SKPD	1 Dokumen	Pendokumentasian laporan tahunan bertanggung jawab keuangan kepada anggaran melalui PPK SKPD
--	--	---	---	-----------	--

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA



YUNI WELDA, SE, M.IP
NIP. 19770614 200501 2 008

Dumai, 25 September 2023
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak



ENI YUSNITA
NIP. 198210525 200501 2 009



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YENNI MARLINA, S.Sos**

Jabatan : ANALIS PERENCANAAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **WAN HAMELDA, SST**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005

PIHAK PERTAMA
ANALIS PERENCANA

YENNI MARLINA, S.Sos
NIP. 19790326 200701 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran : 2023

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
: 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> Membantu membuat rencana Kegiatan Anggaran dan Penginputan Anggaran Tahun 2023 dan Penginputan Perubahan Anggaran Tahun 2023 Membantu membuat konsep kegiatan di bidang PHP Membantu membuat SK kegiatan dibidang PHP Membantu membuat indikator kinerja th 2023 untuk th 2024 Membantu Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Membantu Mengadakan rapat Koordinasi dengan Kecamatan Membantu Melaksanakan rapat Koordinasi dengan Kelurahan Membantu Melaksanakan Kegiatan penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Membantu Membuat Laporan Kegiatan Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar Bidang Perlindungan Hak Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Laporan Kegiatan Berkas Laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Surat 	<p>Pendokumentasian rencana Kegiatan Anggaran dan Penginputan Anggaran Perubahan Tahun 2023</p> <p>Pendokumentasian konsep kegiatan di bidang PHP</p> <p>Pendokumentasian SK Kegiatan di Bidang PHP</p> <p>Pendokumentasian Indikator Kinerja Tahun 2023 untuk Tahun 2024</p> <p>Pendokumentasian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pendokumentasian rapat Koordinasi di Kecamatan</p> <p>Pendokumentasian rapat Koordinasi di Kelurahan</p> <p>Pendokumentasian Kegiatan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak</p> <p>Pendokumentasian Laporan Kegiatan</p> <p>Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang Perlindungan Hak Perempuan</p>

Dumai, 25 September 2023
ANALIS PERENCANA



YENNI MARLINA, S.Sos
NIP. 197903262007012005

ANALIS KEBIDJAKAN AHLI MUDA



WAN HAMILDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb**

Jabatan : PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YUNI WELDA, SE**

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEUANGAN

**YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008**

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

**RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb
NIP. 19760329 201001 2 008**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : 2023

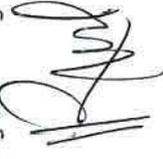
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Membantu Penginputan Aliran Kas Anggaran Perubahan Tahun 2023 2 Membantu menyiapkan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 3 Membantu menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah 4 Membantu membuat laporan inventarisasi 5 Membantu menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran tugas 6 Membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah serta sarana program 7 Membantu menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya	1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Berkas	Pendokumentasian Penginputan Aliran Kas Anggaran Perubahan Tahun 2023 Pendokumentasian menyiapkan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Pendokumentasian menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah Pendokumentasian membuat laporan inventarisasi Pendokumentasian menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran tugas Pendokumentasian menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah serta sarana program Pendokumentasian menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA



YUNI WELDA, SE, M. IP
NIP. 19770614 200501 2 008

Dumai, 25 September 2023
Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender



RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb
NIP. 19760329 201001 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASTIEN SARI NOVA, S. Kep**

Jabatan : ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **AKMALIA YARNELINUR, SKM**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

**AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 19821123 200501 2 004**

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

**ASTIEN SARI NOVA, S.Kep
NIP. 19811115 201001 2 010**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
: 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membantu membuat konsep kegiatan di bidang PKHPKK 2 Membantu membuat SK kegiatan dibidang PKHPKK 3 Membantu Melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG 4 Membantu Membuat Laporan Kegiatan 5 Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar bidang PKHPKK 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Surat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendokumentasian konsep kegiatan di bidang PKHPKK 1 Pendokumentasian SK Kegiatan di bidang PKHPKK 1 Pendokumentasian kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG 1 Pendokumentasian Laporan Kegiatan 1 Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang PKHPKK

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 198211232005012004

Dumai, 25 September 2023

ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK



ASTIEN SARI NOVA, S.Kep
NIP. 19811115 201001 2 010



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ESTER PRISKA DACHI, S.Kep**

Jabatan : ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **LILI KURNIATI, S.Tr. Keb**

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KASUBBAG TATA USAHA

**LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021**

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

**Ns. ESTER PRISKA DACHI, S.Kep
NIP. 19850401 201102 2 002**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
: PERUBAHAN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Mengarsipkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha	14 Dokumen	Melakukan pengarsipan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha
			2 Mengarsipkan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN)	28 Dokumen	Melakukan pengarsipan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN)
			3 Membantu Mengevaluasi data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan	24 Dokumen	Membantu pengevaluasian data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan
			4 Membantu Menyiapkan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan	100 Lembar	Membantu mempersiapkan surat menyurat/ naskah dinas dan kearsipan
			5 Mengarsipkan surat masuk/ yang telah didisposisi dan surat keluar	100 Lembar	Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang telah didisposisi

KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

Dumai, 25 September 2023
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak



Ns. ESTER PRISKA DACHI, S. Kep
NIP. 19850401 201102 2 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LINDA NATARIA, AMK**

Jabatan : PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **LILI KURNIATI, S.Tr. Keb**

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KASUBBAG TATA USAHA

**LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021**

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA

**LINDA NATARIA, AMK
NIP. 19860616 201001 2 038**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S. Psi**

Jabatan : PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**

Jabatan : KEPALA UPT PPA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PPA

**FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007**

PIHAK PERTAMA
PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK

**WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S. Psi
NIP. 19930923 202012 2 018**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
: Perubahan 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas pembangunan gender	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak - hak anak	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengumpulkan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus 2 Menerima pengaduan 3 Menyiapkan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio,kamera, dll) 4 Memeriksa kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir 5 Mengadministrasi aduan kedalam buku register / formulir 6 Mempersiapkan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus 7 Menyusun surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan 8 Memindahkan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA 9 Mendampingi korban di lembaga Hukum 	50 kasus 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 kasus 50 korban	Melakukan pengumpulan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus Melakukan penerimaan pengaduan Melakukan persiapan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio, kamera, dll) Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir Melakukan pengadministrasian aduan kedalam buku register / formulir Melakukan persiapan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus Melakukan penyusunan surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan Melakukan pemindahan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA Melakukan pendampingan korban di lembaga di lembaga Hukum

Dumai, 25 September 2023

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007

PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK



WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S.Psi
NIP. 19930923 202012 2 018

Pengukuran Kinerja

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar}}{\text{jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang berkunjung di Upt PPA}} \times 100$	95	100	105,27%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	$\frac{\text{Skor verifikasi administrasi}}{\text{skor evaluasi mandiri}} \times 100$	750	754,13	100,55%
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) + Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan + Inovasi	810	615	75,93%

Pagu Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 7.666.892.538
 Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 7.338.057.658
 Persentase Capaian Program Tahun 2024 : 95,71%

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
REALISASI BELANJA TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	263.253.700	262.758.000	99.81
1.	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	85.991.100	85.607.000	99.56
1.1	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	52.990.000	52.888.000	99.81
1.2	Sub kegiatan advokasi kebijakan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.044.400	11.960.000	99.30
1.3	Sub kegiatan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.956.700	20.759.000	99.06
2.	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	97.262.600	97.217.000	99.96
2.1	Sub kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, social dan ekonomi	97.262.600	97.217.000	99.96
3.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	79.934.000	99.92
3.1	Sub kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	80.000.000	79.934.000	99.92
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	185.546.000	166.145.600	89.54
1.	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.908.000	67.908.000	100
1.1	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	67.908.000	67.908.000	100
2.	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	92.638.000	77.173.000	83.31

2.1	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	92.638.000	77.173.000	83.31
3.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	21.064.600	84.26
3.1	Sub kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	25.000.000	21.064.600	84.26
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5.999.300	5.997.500	99.97
1.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.999.300	5.997.500	99.97
1.1	Sub kegiatan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	5.999.300	5.997.500	99.97
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.524.980	39.088.900	96.45
1.	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.524.980	39.088.900	96.45
1.1	Sub kegiatan penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	29.520.500	29.021.900	98.31
1.2	Sub kegiatan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	11.004.480	10.067.000	91.48
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	188.990.200	185.087.161	97.93
1.	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	6.449.700	6.448.700	99.99
1.1	Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	6.449.700	6.448.700	99.99
2.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	182.540.500	178.638.461	97.87

2.1	Sub kegiatan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	40.000.000	39.157.861	97.90
2.2	Sub kegiatan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasipemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	129.993.300	126.940.000	97.66
2.3	Sub kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	12.547.200	12.540.600	99.95
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	467.453.580	405.093.983	86.65
1.	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81.592.000	81.592.000	100
1.1	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	81.592.000	81.592.000	100
2.	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	284.201.580	234.180.580	82.40
2.1	Sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	29.999.580	28.528.580	95.10
2.2	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	254.202.000	205.652.000	80.91
3.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000	89.321.403	87.87
3.1	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan	101.660.000	89.321.403	87.87
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.515.124.778	6.273.886.514	96.30
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.222.000	31.126.600	96.60
1.1	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8.354.000	8.354.000	100
1.2	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.997.900	5.997.900	100

1.3	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1.911.500	1.911.500	100
1.4	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	3.417.800	3.417.800	100
1.5	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1.212.000	1.212.000	100
1.6	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.786.800	4.786.800	100
1.7	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	6.542.000	5.446.600	83.26
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.644.387.571	4.427.274.654	95.33
2.1	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.664.387.571	4.427.274.654	95.33
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.487.506	358.719.053	99.24
3.1	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5.000.000	4.957.700	99.16
3.2	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73.925.001	73.501.320	99.43
3.3	Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	14.523.553	13.957.400	96.11
3.4	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	47.803.647	46.660.000	97.61
3.5	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.515.720	17.971.200	97.06
3.6	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.728.000	7.728.000	100
3.7	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	193.991.585	193.943.433	99.98
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	498.532.581	495.531.000	99.40
4.1	Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	125.208.000	125.160.000	99.97
4.2	Sub kegiatan pengadaan mebel	55.648.000	55.230.000	99.25
4.3	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	85.998.492	84.800.000	98.61

4.4	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	231.678.089	230.341.000	99.43
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.354.120	827.244.207	97.98
5.1	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	174.000	170.000	97.71
5.2	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.160.000	91.960.827	92.74
5.3	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	745.020.120	735.113.380	98.67
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.141.000	133.991.000	99.89
6.1	Sub penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.530.000	38.530.000	100
6.2	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	83.221.000	83.211.000	99.99
6.3	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.680.000	5.600.000	98.60
6.4	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	6.710.000	6.650.000	99.11
TOTAL ANGGARAN		7.666.892.538	7.338.057.658	95.71

Dokumentasi

Penghargaan Kota Layak Anak



Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

